

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kedaulatan yang dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Memasuki era baru dalam kehidupan masyarakat yang mengarah pada reformasi di segala bidang dengan menjunjung masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan di daerah maupun dipusat. Oleh sebab itu, mengarah pada pelaksanaan desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan reformasi. Pada negara kesatuan yang independensi hanya terdapat di pemerintah pusat, sehingga seluas apapun otonomi tanggung jawab terakhir akan berada pada pemerintah pusat (Lasatu, 2020). Kewenangan ini tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah turut andil di dalamnya.

Tertulis pada UU Nomor 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan pusat dan daerah, jadi dengan itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menjaga daerahnya yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dalam mencapai otonomi daerah yang tidak terbatas dibutuhkannya manajemen keuangan daerah yang dapat terkontrol secara transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, dengan itu laporan keuangan dapat dinyatakan *valid* bila tidak terdapat kerugian yang signifikan.

Pemerintah setiap daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dimana ialah bentuk dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala daerah (Sweetenia et al., 2019). Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2010 yang membahas tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang tidak hanya tentang pemerintah pusat namun juga, terletak pada pemerintah daerah (Paramayana, Dewi, dan Astungkara 2022).

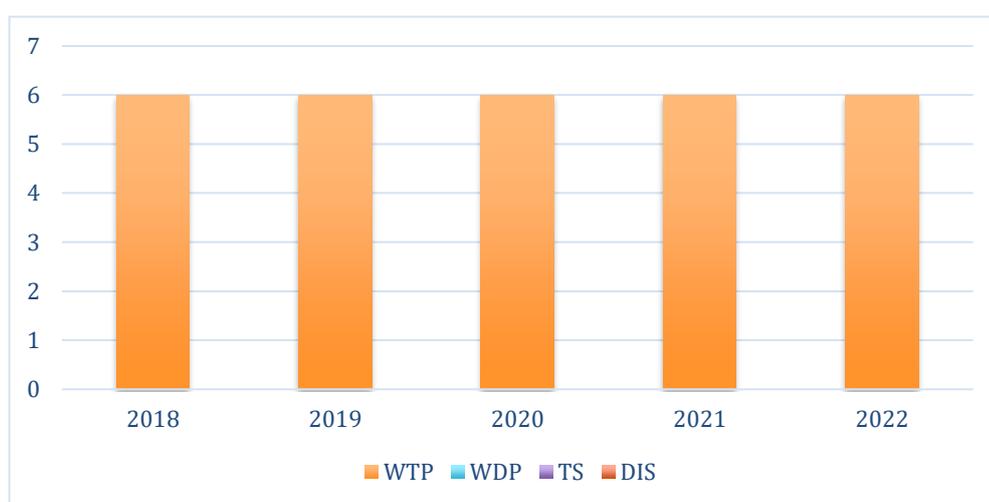
Untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar akuntansi di perlukannya pemeriksaan dan pengawasan. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK untuk memberikan pendapat tentang kewajaran keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada empat faktor yaitu (Pemda, 2023) :

- a. Kesesuaian dengan peraturan akuntansi pemerintahan
- b. Seberapa efektif sistem pengendalian internal
- c. Kepatuhan terhadap peraturan
- d. Pengungkapan penuh

Kondisi saat ini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2022 dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Dr.

Isma Yatun, CSFA., CFrA mengungkapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam rapat paripurna DPRD DIY, telah sukses memperoleh ke-13 kalinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK, 2023).

Gambar 1. 1
Opini LKPD Wilayah DIY



Sumber : yogyakarta.bpk.go.id

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa hasil pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah daerah DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah sukses mempertahankan posisinya dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terkait menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab, dari pencapaian ini aparatur negara dituntut untuk terus bekerja keras dan berkomitmen untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Meski telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 kali berturut-turut Pemda DIY masih mendapatkan catatan atas masalah yang harus

ditindaklanjuti dengan segera. Salah satu catatan tersebut yaitu, terlaksananya pekerjaan PPI (Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan) Pantai Gesing, melampaui tahun anggaran dan menerima pembayaran lebih dari kemajuan fisik proyek. Isma Yatun (Ketua BPK RI), mengatakan Pemda DIY telah membayar pemasok hingga Rp 108 miliar atau 100 persen dari nilai kontrak. Sementara pekerjaan utama yaitu Pembangunan danau belum bisa dilanjutkan kembali. Nuryadi selaku ketua DPRD DIY menyatakan bahwa, laporan hasil penelitian ini hendaknya ditanggapi secara serius dan dijadikan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemda DIY. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab bersama yang dimana sebagai lembaga legislatif mempunyai peran besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan masyarakat (DPRD, 2023).

Berdasarkan pada isu diatas, DPRD DIY terdorong untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan untuk mengelola keuangan publik. Pengawasan kualitas laporan keuangan, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Sebagai sumber daya, transparansi memotivasi partisipasi masyarakat untuk demokrasi, menumbuhkan rasa kepercayaan, membasmi korupsi, dan menggunakan untuk pengambilan keputusan (Cuillier dan Piotrowski, 2009). Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi sektor publik bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang tepat dan berguna. Ini memungkinkan informasi pengguna untuk mengevaluasi dan membuat keputusan dengan lebih rasional dan logis (Nogueira et al., 2013).

Namun, tidak banyak informasi tentang penggunaan laporan keuangan oleh politisi, terutama dari DPRD DIY. Dengan ini, timbulnya pertanyaan tentang bagaimana politisi menggunakan laporan keuangan, khususnya tentang seberapa efektif informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pengguna internal untuk pengambilan keputusan (Probo et al., 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Van Helden dan Reichard, (2019) dimana masih mempertanyakan apakah para anggota parlemen atau pemerintah dapat menggunakan informasi akuntansi dengan tepat atau tidak, dan situasi ini masih menjadi perbincangan dalam beberapa literatur akuntansi.

Studi ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna tentang seberapa banyak informasi yang diperlukan, di mana informasi harus disajikan, bagaimana menemukan laporan keuangan yang relevan, dan apa yang mereka pikirkan tentang laporan keuangan adalah sesuatu yang mudah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada komponen yang mempengaruhi *Usefulness Financial Reporting*, di antaranya *Internal Audit*, *Environmental Accounting*, *Interface*, dan *Local Financial Accounting System*

Laporan Keuangan pada setiap entitas pemerintah diyakini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya, konsep kebermanfaatan informasi didefinisikan sebagai peningkatan beberapa atribut kualitas informasi. Informasi yang akurat dalam laporan keuangan terkait dengan adanya relevansi dan keandalan, sehingga penyajian informasi akuntansi yang akan relevan, meyakinkan, dan sesuai, Informasi akuntansi tersebut akan dapat

digunakan dengan ketentuan dan tepat dalam mengambil keputusan (Ralph Kober et al., 2010).

Penelitian ini berkaitan dengan ayat Al-qur'an yaitu : Al-qur'an surat An-nisaa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Menurut surat An-nisa ayat 58 menjelaskan tentangnya pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan pemberi kepada yang menerimanya, dengan harapan pihak penerima tidak lalai dalam menjalankan amanah dan adil dalam bertindak. Seperti pemerintah daerah yang harus memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dana tidak dipublikasikan, warga tidak tahu bagaimana dana itu digunakan untuk apa. Sebagai orang yang harus membayar pajak, masyarakat pasti ingin transparansi untuk menciptakan akuntabilitas (Paramayana et al., 2022).

Ayat tersebut berkaitan dengan memberikan keadilan kepada masyarakat. Pembentukan hukum yang *responsive* adalah jenis kebijakan hukum yang berfokus pada rasa keadilan masyarakat, dimana pengambilan keputusan mempertimbangkan umpan balik masyarakat yang percaya pada dasarnya (Apriansyah, 2016). Maka dengan itu DPRD harus mampu mengakomodasi

aspirasi masyarakat secara lebih adil dan proposional, sesuai kebijakan yang telah di tetapkan (Lasatu, 2020).

Dalam setiap entitas pemerintah akan selalu dibutuhkan pengendalian internal, informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Akan baik apabila pengendalian internal didalamnya berjalan dengan baik maka. Ini berarti bahwa orang yang menggunakan laporan keuangan lebih mudah membuat keputusan yang tepat (Fatmawati & Setiawan, 2018).

Internal audit memiliki fungsi yang efektif beralih ke audit elektronik, yang dimana dimaksud prosedur audit dilakukan dengan memerlukan teknologi informasi dan analisis data dalam melaporkan keterampilan pengendalian internal dan keakuratan data keuangan, serta menghimpun bukti elektronik (Alqudah et al., 2023). *Internal audit* diintegrasikan ke dalam sistem audit internal, termasuk prosedur audit, metode audit (misalnya tinjauan dokumen, wawancara dan observasi) dan pegawai yang mengelola dan melaksanakan audit (Hanskamp-Sebregts et al., 2020). Pengendalian internal yang baik, akan diikuti dengan pengawasan yang baik maka hal itu akan menghambat pihak internal untuk bertindak menyimpang. Serta dapat menunjang DPRD menilai efektivitas pengendalian internal secara terstruktur, pelaksanaan audit internal yang teratur akan bermanfaat untuk meningkatkan informasi keuangan dan mengurangi adanya tindakan pelanggaran.

Environmental Accounting menjadi hal sangat penting yang dibutuhkan untuk suatu organisasi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh *stakeholder*

yang sudah banyak mengetahui masalah dan solusi lingkungan, sehingga menekan manajer untuk lebih memperhatikan penilaian kinerja lingkungan (Burritt dan Schaltegger, 2010). Pengelolaan lingkungan pada organisasi, memiliki tujuan utama yaitu mempertimbangkan dan menjadi sebagai keunggulan kompetitif pengguna dan implementasi strategi lingkungan. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi akuntansi sangat menunjang pengguna (Susanto dan Meiryani, 2019). Pengguna informasi akuntansi mencoba memanfaatkan kegunaan informasi tersebut untuk melengkapi keterbatasan mereka.

Munculnya Environmental AIS dalam dunia bisnis yang modern, adalah hasil dari penekanan negara pada praktik usaha yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, gagasan ekonomi hijau dalam konteks dipromosikan untuk menjaga lingkungan. Tujuannya yaitu, untuk menaksir dampak lingkungan negatif yang dapat mempengaruhi organisasi dan ekonomi (Meiryani dan Lusianah, 2018). Terdapat banyak hal yang dibahas akuntansi lingkungan, seluruh halnya berjangka panjang dan dapat dilaporkan. Perencanaan masa depan, dengan tujuan untuk mengantisipasi kerugian yang disebabkan lingkungan. Sejalan dengan kebermanfaatan laporan keuangan untuk menunjang rencana masa depan tersebut. Dunia bisnis dimasa lalu, sangat terasa lemahnya akuntansi manual yang menggunakan kertas sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi. Dengan penggunaan tersebut, suatu kekeliruan pada pelaporan keuangan tidak mudah terlihat jika tidak teliti dalam pemeriksaannya. Oleh sebab itu dibutuhkannya, kontribusi teknologi informasi akuntansi yang relevan dan reliabel

(Al - Fatlawi, 2018; Chidoko, 2014; Edame, 2014; G et al., 2016; Marshal, 2017; Zhixia et al., 2018; Zomorodi & Zhou, 2016)

Kemajuan teknologi telah membawa masuknya teknologi informasi di berbagai bidang (Alqudah et al., 2023; Jadil et al., 2022; Kar & Dwivedi, 2020). Terutama dalam konteks ekonomi, industri audit semakin diperhatikan dari aspek ekonomi, keuangan, hukum dan bahkan sosial (Alzoubi, 2019). Dengan modifikasi digital di seluruh dunia dan sebagian besar otomatisasi proses bisnis, terutama setelah efek pandemi corona audit internal elektronik menjadi bagian terstruktur dari manajemen perusahaan (Alqudah et al., 2023). Oleh sebab itu, DPRD membutuhkan audit internal untuk mengambil keputusan bersama.

Pesatnya kemajuan teknologi membuat banyak desain aplikasi baru untuk para penggunanya mengakses segala hal dengan mudah, bahkan desain perangkat lunak terus berkembang dan mengalami pembaruan. Pengalaman pengguna memberikan pengaruh pada pengguna itu sendiri saat menggunakan aplikasi atau situs web tersebut (Moon et al., 2017). Pengalaman pengguna merupakan pengalaman yang dibuatkan produk untuk setiap orang yang memanfaatkannya di dunia nyata (Garrett, 2010). Maka dari itu, pengalaman pengguna mempengaruhi setiap pengguna laporan keuangan dalam situs web maupun laporan keuangan secara langsung.

Pengguna Informasi Akuntansi butuh laporan keuangan yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan organisasi yang dimana informasi tersebut mudah diakses dan dapat mudah dimengerti dengan jelas. Bagi

para pengguna menggunakan aplikasi yang memiliki fitur yang membosankan dan sulit dimengerti, seperti fitur yang dibuat lebih banyak tetapi tidak ada manfaat bagi para pengguna. Hal ini membuat tujuan para pengguna tidak terpenuhi dengan baik dalam menggunakan aplikasi tersebut (Constantine, 2004). Dalam akuntansi, pengguna laporan keuangan juga sangat dibutuhkan untuk para pemangku kepentingan internal memenuhi tujuan mereka maka dari itu, aplikasi yang mudah diakses dan digunakan sangat perlu. Kepuasan para pengguna dapat terpenuhi apabila aplikasi yang digunakan dapat memberikan informasi dengan baik dan lengkap. Dengan itu *interface* dibutuhkan untuk pengguna memahami informasi yang disajikan secara cepat dan jelas, dengan berbagai visual menarik yang ditampilkan.

Sebagai pengelola dana publik, pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting untuk memberikan informasi tentang operasi dan kinerja keuangan pemerintah daerah guna membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik (Br Purba dan Mendina Amrul, 2018). Untuk menghasilkan kualitas informasi keuangan yang baik diperlukannya sistem akuntansi karena, sebagai alat kontrol keuangan yang dimana membantu mengatur dana agar sesuai dengan tujuan dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif (Widiawati et al., 2018). Untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah berkualitas tinggi. Laporan keuangan yang baik tentu memerlukan prosedur pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan dan sistem akuntansi daerah (Defitri, 2018).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya Helden dan Reichard, (2019) yang didalamnya menyatakan bahwa ada kurangnya penelitian empiris tentang kebutuhan pengguna dan kegunaan informasi akuntansi di sektor publik, dan bahwa lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami kondisi atau konteks yang berkontribusi pada penggunaan informasi akuntansi. Sekaligus jaranganya penelitian dilakukan dengan variabel *interface* khususnya Indonesia. Dengan itu, penelitian ini melakukan pengembangan yang dimana variabel *interface* sebagai variabel independen, Perbedaan yang ada pada penelitian ini dan sebelumnya yaitu, peneliti menambahkan variabel *Internal audit*, *Environmental Accounting*, dan *Local Financial Accounting System* di dalam penelitian ini karena dianggap mempengaruhi terhadap *usefulness financial reporting* sebagai variabel dependen dan penelitian ini akan dilakukan kepada sektor publik, yaitu DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini pun dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi sektor publik untuk lebih meningkatkan sistem laporan keuangan dan menguji seberapa penting laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dengan itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH *INTERNAL AUDIT*, *ENVIRONMENTAL ACCOUNTING*, *INTERFACE*, DAN *LOCAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM* TERHADAP *USEFULNESS FINANCIAL REPORTING* (STUDI EMPIRIS PADA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Internal Audit* berpengaruh positif signifikan terhadap *Usefulness Financial Reporting*?
2. Apakah *Environmental Accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap *Usefulness Financial Reporting*?
3. Apakah *Interface* berpengaruh positif signifikan terhadap *Usefulness Financial Reporting*?
4. Apakah *Local Financial Accounting System* berpengaruh positif signifikan terhadap *Usefulness Financial Reporting*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *internal audit* terhadap *usefulness financial reporting*
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *environmental accounting* terhadap *usefulness financial reporting*
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *interface* terhadap *usefulness financial reporting*
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *local financial accounting system* terhadap *usefulness financial reporting*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama pemahaman mengenai laporan keuangan pada sektor public. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya untuk referensi dalam meneliti topik penelitian yang membahas tentang *Usefulness Financial Reporting*. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki *Usefulness Financial Reporting* pada setiap entitas, agar semakin bermanfaat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil di antaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah tentang peran DPRD dalam menjalankan tugas pengelola laporan keuangan daerah dan juga dalam menilai kinerja DPRD

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat pemahaman yang lebih terkait dengan *usefulness financial repoting*, serta memberikan pengetahuan untuk masyarakat tentang bagaimana mereka berperan sebagai seorang *user*.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang *usefulness financial repoting*, khususnya di lingkungan pemerintahan.